

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH  
DAERAH (LPPD)  
DAN  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG  
JAWABAN (LKPJ)  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2021**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Dasar Hukum.....	1
B. Data Geografis Wilayah .....	2
<b>BAB II HASIL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH .....</b>	<b>3</b>
A. Ringkasan Urusan Wajib.....	3
B. Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	4
C. Tingkat Capaian urusan Wajib.....	5
D. Alokasi dan Realisasi Anggaran.....	7
E. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah.....	9
F. Kondisi Sarana dan Prasarana yang di gunakan.....	9
G. Kebijakan Strategis yang ditetapkan.....	11
H. Tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya.....	12
<b>BAB III PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN BELANJA DAERAH.....</b>	<b>13</b>
<b>BAB IV CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....</b>	<b>14</b>
A. Indikator Kinerja Kunci Keluaran.....	14
B. Indikator Kinerja Kunci Hasil .....	15
C. Akuntabilitas Kinerja .....	16
<b>BAB V TUGAS PEMBANTUAN.....</b>	<b>17</b>
<b>BAB VI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL .....</b>	<b>18</b>
A. Urusan ketentraman. Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ....	18
B. Target pencapaian SPM .....	18
C. Realisasi SPM.....	18
D. Alokasi Anggaran.....	19
E. Dukungan Personil.....	20
F. Permasalahan dan Solusi.....	20
<b>BAB IX PENUTUP .....</b>	<b>22</b>

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah Nya sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2021 Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut dapat diselesaikan.

Penyusunan laporan ini merupakan kewajiban bagi Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kepala Daerah setelah tahun anggaran berakhir wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban kepada DPRD, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam penyusunan LPPD dan LKPJ ini tetap mengacu pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 yang merupakan suatu Dokumen Perencanaan Formal, sehingga semua komponen secara lengkap telah disajikan mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

LPPD dan LKPJ Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Laut ini tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi, namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut. Semoga LPPD dan LKPJ Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Laut ini dapat memberikan peningkatan kinerja Aparatur khususnya pada tahun mendatang.

Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten tanah Laut mampu melaksanakan tugas pengabdian dan memberikan pelayanan kebencanaan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.

Kepala Pelaksana BPBD  
Kabupaten Tanah Laut



**Ir. SAHRUDIN**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19661210 199403 1 007

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN SKPD**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah laut mempunyai tugas pokok Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 Pasal 26B Ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai tugas :
  - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi secara adil dan serta;
  - b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. Menyusun menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
  - e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - g. Mengedalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Serta memiliki fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 Pasal 26C Ayat (1) dan (2), Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26B, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

- (1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- (2) Pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. Terkait analisis Kinerja Pelayanan SKPD. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut

## B. DATA GEOGRAFIS WILAYAH

Kabupaten Tanah Laut terletak pada posisi  $114^{\circ}30'20$  BT –  $115^{\circ}23'31$  BT dan  $3^{\circ}30'33$  LS -  $4^{\circ}11'38$  LS dengan batas-batas administratif sebagai berikut :

Batas Wilayah

Utara Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru

Timur Kabupaten Tanah Bumbu dan Laut Jawa

Selatan Laut Jawa

Barat Laut Jawa

Luas wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah  $3.631,35 \text{ km}^2$  ( $363.135 \text{ ha}$ ) atau sekitar  $9,71\%$  dari luas Provinsi Kalimantan Selatan. Daerah yang paling luas adalah Kecamatan Jorong dengan luas  $628,00 \text{ km}^2$ , kemudian Kecamatan Batu Ampar seluas  $548,10 \text{ km}^2$  dan Kecamatan Kintap dengan luas  $537,00 \text{ km}^2$ , sedangkan kecamatan yang luas daerahnya paling kecil adalah Kecamatan Kurau dengan luas hanya  $127,00 \text{ km}^2$ . Berdasarkan tingkat kelandaiannya wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok, yaitu meliputi wilayah datar (kemiringan  $0-2\%$ ) sebesar  $290.147 \text{ ha}$ , wilayah bergelombang (kemiringan  $2-15\%$ ) sebesar  $43.060 \text{ ha}$ , wilayah curam (kemiringan  $15-40\%$ ) sebesar  $26.833 \text{ ha}$  dan wilayah sangat curam (kemiringan  $>40\%$ ) sebesar  $12.890 \text{ Hektar}$ .

Kondisi Geografis wilayah Kabupaten Tanah Laut, sebagian merupakan dataran rendah dan curah hujan yang tidak menentu, sehingga sistem pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase tidak mampu menampung debit air kiriman dari sungai yang berhulu di Kabupaten Tetangga sehingga mengakibatkan banjir hampir secara rutin setiap tahunnya.

Kondisi sungai yang semakin hari / semakin lama semakin dangkal dan semakin menyempit serta berkurangnya daerah resapan air hal ini berkontribusi meningkatnya debit air. Jika terjadi curah hujan yang cukup tinggi akan mengalir kepemukiman maka ruas sungai alamiah kapasitasnya terlampaui dan mengakibatkan banjir, sehingga potensi bencana yang sering terjadi di Kabupaten Tanah Laut adalah bencana banjir dan bencana kebakaran hutan dan lahan.

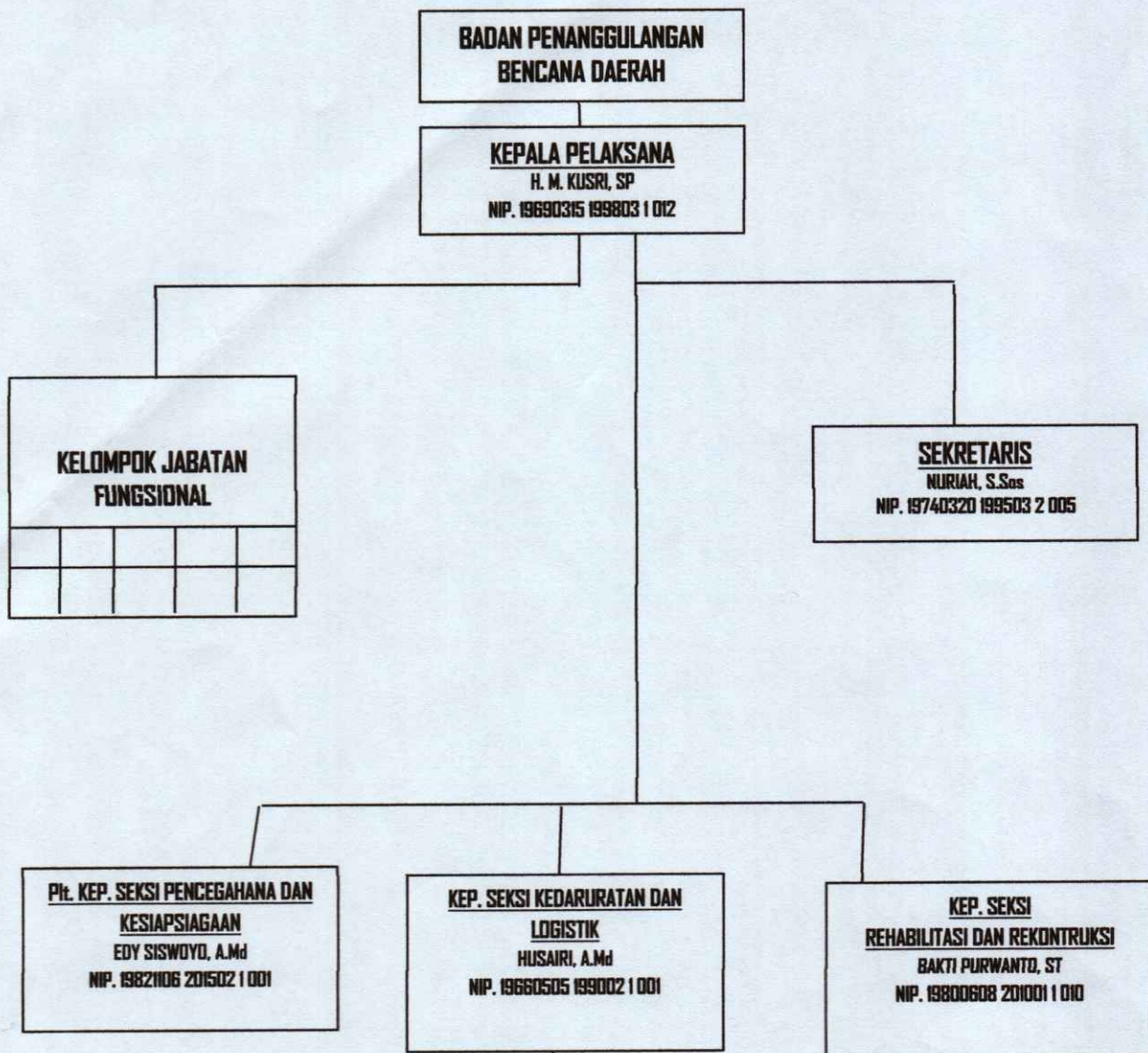
**BAB II**  
**HASIL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**  
**YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

**A. RINGKASAN URUSAN WAJIB**

**2.1 Organisasi perangkat Daerah Pelaksana**

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

**BAGAN 1.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**



## 2.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2021 sebagai berikut :

NO	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 792.000,-
				2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 509.200,-
				3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 435.200,-
				4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 887.200,-
				5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp. 900.100,-
				6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 20.003.980,-
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 2.327.832.388,-
				1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 49.966.000,-
		4	Administrasi umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 3.346.310,-
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 21.910.240,-
				3	Penyediaan Barang Cetak dan Penganggandaan	Rp. 10.845.120,-
				4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 240.990.000,-
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Rp. 65.387.920,-

			Pemerintahan Daerah	2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 20.705.740,-
				3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 144.866.056,-
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Rp. 292.797.160,-
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 21.295.000.-
2	Program Penanggulangan Bencana	1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Rp. 33.228.400,-
		2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	Rp. 918.820.036,-
				2	Penanganan Pascabencana Kabupaten / Kota	Rp. 82.525.086,-
		3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana	1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	Rp. 824.913.706,-
				2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana Kabupaten / Kota	Rp. 95.350.900,-
			J U M L A H			Rp. 5.178.307.742,-

### 2.3 Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Tingkat capaian secara fisik untuk urusan Wajib Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut yaitu urusan kebencanaan yang terjadi pada tahun 2021 mencapai 100% sudah tertangani dan menyalurkan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Tabel 2.1

## Kejadian Bencana di Kabupaten Tanah Laut

Laporan Kejadian Bencana Yang Ditangani Oleh BPBD Kab. Tanah Laut Tahun 2021

NO	JENIS BENCANA	JUMLAH KEJADIAN
1.	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN KEBAKARAN PEMUKIMAN, FASILITAS UMUM DAN LAIN-LAIN	73 Kali
2.	POHON TUMBANG	1 Kali
3.	EVAKUASI KORBAN TELAH MENINGGAL DUNIA, PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	7 Kali
4.	ANGIN PUTING BELIUNG	6 Kali
5.	BANJIR	79 Kali
6.	PASANG AIR LAUT	13 Kali
7.	TANAH LONGSOR	2 KALI
TOTAL KEJADIAN		181 Kali

Bencana yang terjadi terdapat Peningkatan sehubungan dengan kejadian bencana yang di tangani oleh BPBD Tahun 2021 sebanyak 181 Kali kejadian, sedangkan Tahun 2020 yang ditangani sebanyak 120 kali kejadian lebih tinggi dari tahun 2020 disebabkan oleh Faktor alami seperti pengaruh *El-Nina*, menyebabkan musim hujan yang cukup panjang. Musim hujan 2021 kali ini diwarnai oleh latar belakang fenomena iklim global La Nina yang terjadi sejak awal Oktober 2020 dan diprediksi akan berlangsung hingga Mei 2021 dengan intensitas La Nina Moderat menjadi La Nina Lemah pada Maret 2021. Sementara itu, saat ini, analisis anomali suhu muka laut Samudera Pasifik bagian tengah menunjukkan kondisi lebih dingin minus 1.34 derajat Celcius dari normalnya.

Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kejadian bencana pada Tahun 2021 terjadi peningkatan dan Tahun 2020 di Kabupaten Tanah Laut ini mengalami kenaikan dengan persentase kejadian 66%. ini dikarenakan ini diakibatkan fenomena El Nina. La Nina merupakan fenomena Suhu Muka Laut (SML) di Samudera Pasifik bagian tengah mengalami pendinginan di bawah kondisi normalnya. Pendinginan Suhu Muka Laut (SML) ini mengurangi potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik tengah dan meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia secara umum. La Nina juga berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, dan sebagainya sehingga di tahun 2021 di Kabupaten Tanah Laut bencana banjir terjadi cukup tinggi.

3 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut terhitung pada bulan Desember 2021 adalah 15 (lima belas) orang sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2  
Jumlah Pegawai Pergolongan / Pendidikan Tahun 2021

Golongan / Kepangkatan				Jumlah	Pendidikan							Jumlah
Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I		S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	
1	4	10	-	15	-	4 (Pejabat Struktural)	1	-	9	-	-	15

2.4 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Tabel 2.3

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rp.3.223.469.614	Rp.2.522.081.647	78,24
II	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Rp.23.527.680	Rp. 8.523.200	36,23
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 792.000	Rp. 791.900	99,99
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp .509.200	Rp. 509.000	99,96
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 435.200	Rp. 435.200	100,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 887.200	Rp. 887.200	100,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp.900.100	Rp. 899.900	99,98
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.20.003.980	Rp. 5.000.000	25,00
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.2.327.832.388	Rp.1.763.624.127	75,76
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.2.327.832.388	Rp.1.763.624.127	75,76

III	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp.49.966.000</b>	<b>Rp.46.824.400</b>	<b>93,71</b>
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp.49.966.000	Rp.46.824.400	93,71
IV	<b>Administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp.277.091.670</b>	<b>Rp.186.702.895</b>	<b>67,38</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp.3.346.310	Rp.2.129.000	63,62
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.21.910.240	Rp.19.893.200	90,79
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penganggotaan	Rp.10.845.120	Rp.8.028.000	74,02
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.240.990.000	Rp.156.652.695	65,00
V	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp.230.959.716</b>	<b>Rp. 211.292.301</b>	<b>91,48</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Rp.65.387.920	Rp. 50.990.529	77,98
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 20.705.740	Rp. 20.682.000	99,89
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.144.866.056	Rp.139.619.772	96,38
VI	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp.314.092.160</b>	<b>Rp.305.114.724</b>	<b>97,14</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Rp. 292.797.160	Rp.287.784.724	98,29
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 21.295.000	Rp. 17.330.000	81,38
2	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	<b>Rp. 1.954.838.128</b>	<b>Rp.1.227.146.511</b>	<b>62,77</b>
I	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota</b>	<b>Rp.33.228.400</b>	<b>Rp. 30.847.900</b>	<b>92,84</b>
1	Sosialisasi, komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten / kota	Rp. 33.228.400	Rp. 30.847.900	92,84
II	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>	<b>Rp.1.001.345.122</b>	<b>Rp.836.234.107</b>	<b>83,51</b>
1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Rp.918.820.036	Rp.786.329.452	85,58

2	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten / Kota	Rp. 82.525.086	Rp.49.904.655	60,47
III	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Rp. 920.264.606</b>	<b>Rp.360.064.504</b>	<b>39,13</b>
1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	Rp. 824.913.706	Rp. 273.425.524	33,15 ✓
2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Rp. 95.350.900	Rp. 86.638.980	90,86
	<b>J U M L A H</b>	<b>Rp. 5.178.307.742</b>	<b>Rp.3.749.228.158</b>	<b>72,40</b>

2.5 Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sebagai dokumen perencanaan daerah yang memuat visi dan misi serta program pembangunan selama 5 (lima) tahun, perencanaannya harus berpedoman kepada RPJPD yang memiliki durasi 20 (dua puluh) tahun dan sekaligus menjadi pedoman bagi perencanaan pembangunan tahunan dalam dokumen RKPD. Dalam mengoperasionalkan pencapapaian visi, misi tujuan dan sasaran dalam RPJMD, maka seluruh Perangkat Daerah menyusun Renstra OPD yang berdurasi 5 (lima) tahun. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja) sebagai dokumen perencanaan tahunan masing-masing Perangkat Daerah. Sejalan dengan itu, penyusunan LPPD dan LKPJ BPBD Kabupaten Tanah laut berpedoman kepada: (1) RPJPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025, (2) RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036.

2.6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang di gunakan

Mulai Tahun 2017 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut telah menempati Ex Kantor Badan Kesbangpol dengan luas bangunan ± 144 m<sup>2</sup> yang beralamat di Jalan Syahrani Pelaihari. Gedung Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki beberapa ruangan yang masih dapat difungsikan berikut ini

Tabel Tabel 2.4

Kondisi Sarana yang digunakan

No	JENIS RUANGAN	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
1.	Kepala Badan	1	Ruang	Cukup Baik
2.	Sekretariat	1	Ruang	Baik
3.	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1	Ruang	Baik
4.	Kasi Rehabilitasi dan rekonstruksi	1	Ruang	Baik

5.	Kasi Kedaruratan dan Logistik	1	Ruang	Baik
6.	Ruang Bendahara dan Bendahara Pembantu	1	Ruang	Baik
7.	Gudang Logistik	1	Ruang	Kurang Baik
8.	Kamar mandi	2	Ruang	Cukup Baik

**Tabel 2.5.**  
**SARANA DAN PRASARANA**

Nama Perangkat Daerah	Dasar Pembentukan	Struktur Organisasi	Sarana Prasarana		Ket
			Jenis Sarpras	Sumber Anggaran (APBN / APBD / Hibah)	
BPBD Kab. Tanah Laut	Perda Kab. Tala No. 10 Th. 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut	Kepala Pelaksana	Bangunan Kantor	APBD	Kantor BPBD
		Sekretaris	Garasi	APBD	Kantor BPBD
		Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pusdalops	APBD	Ada
		Kasi Kedaruratan dan Logistik	Gudang Logistik	APBD	Kantor BPBD
		Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Posko BPBD	APBD	1. Kec. Takisung 2. Kec. Kurau 3. Kec. Bati2 4. Kec. Jorong 5. Kec. Kintap
			Mesin Portable	APBN	1 buah
			Pompa Apung	APBN	2 buah
			Pompa Pemadam Karhutla Utama	APBN	1 buah
			Pompa Pemadam Karhutla Menengah	APBN	1 buah
			Flexible Tank 1500 gl	APBN	1 buah
			Perahu Evakuasi	APBN	2 buah

		Mobil Rescue	APBN	1 buah
		Motor Trail	APBN	2 buah
		Tenda Posko	APBN	1 buah
		Tenda Pengungsi	APBN	2 buah
		Solar Cell	APBN	5 buah
		Tenda Keluarga	APBN	7 buah
		Solar Handle lamp	APBN	8 buah
		Velbed	APBN	35 buah
		Genset 1,2 KW	APBN	2 buah
		Genset 5,5 KA	APBN	1 buah
		Senter Rescue HID Search Light	APBN	5 buah
		Chainsaw	APBN	1 buah
		Handy Talky	APBN	5 buah
		RIG	APBN	5 buah
		SSB	APBN	3 buah
		WTP	APBN	1 buah
		Mesin Portable	APBD	1 buah
		Mini Bus Avanza	APBD	1 buah
		Pick Up	APBD	1 buah
		Pemadam Kebakaran 4000 liter	APBD	6 buah
		Pemadam 500 liter	APBD	1 buah
		Sepeda Motor Trail	APBD	2 buah
		Sepeda Motor	APBD	5 buah
		Perahu Dolphin	APBD	1 buah
		Perahu Karet	APBD	6 buah
		Velbed	APBD	22 buah
		Genset	APBD	2 buah
		Tenda Pleton	APBD	2 buah

## 2.7 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

BMKG memprediksi La Nina akan mencapai puncak pada bulan Desember 2020 s/d Januari 2021, yang kemudian dilanjutkan dengan puncak musim hujan yakni sekitar bulan Februari 2021 sehingga Kabupaten Tanah Laut yang diakibatkan curah hujan yang tinggi, cuaca ekstrem La Nina dan meningkatnya debit air mengakibatkan meluasnya bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Tanah Laut. Sehingga Bupati Tanah Laut perlu menetapkan status tanggap darurat banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Tanah Laut selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 11 Januari s/d 25 Januari 2021. Kebijakan strategis dimasa tanggap darurat yaitu :

**Tabel 3.1 Kebijakan Strategis yang diambil Dalam Satu Tahun Anggaran**

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Penetapan status tanggap darurat bencana banjir dan angin puting beliung	Keputusan Bupati Nomor 188.45/68-KUM/2021	Penanggulangan dan pengendalian terhadap bencana banjir dan angin puting beliung
2	Pembentukan satuan tugas dan pos komando tanggap darurat bencana banjir dan angin puting beliung	Keputusan Bupati Nomor 188.45/98-KUM/2021	Membentuk satuan tugas dan pos komando serta menunjuk personil pos komando tanggap darurat bencana.
3	Alokasi dana dari pos Belanja Tidak Terduga	Keputusan Bupati Nomor 188.45/87-KUM/2021	Untuk biaya operasional dan sarana prasarana yang rusak akibat bencana banjir dan angin puting beliung
4	Petunjuk teknis pelaksanaan bantuan stimulant rumah rusak	Keputusan Bupati Nomor 188.45/775-KUM/2021	Pendukung proses percepatan pelaksanaan pembangunan dan perbaikan rumah rusak dampak bencana banjir dan tanah longsor
5	Penutupan obyek wisata, Ruang terbuka hijau (RTH) dan pelarangan acara tahun baru 2022	Instruksi Bupati Nomor 16 Tahun 2021	1. Mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. 2. Mencegah dan mengatasi aktivitas berkumpul di tempat fasilitas umum, hiburan, dan tempat wisata tahun baru 2022

## 2. 8 . Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran 2021 kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak ada.

**BAB III**  
**PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN**  
**BELANJA DAERAH**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut semula berjumlah Rp. 5.271.129.022,00 berkurang sejumlah Rp. 92.821.280,00 sehingga menjadi Rp 5.178.307.742,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

BPBD tidak melaksanakan pendapatan daerah

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp 5.271.129.022,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 92.821.280,00

Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 5.178.307.742,00

Surplus/(Defisit) setelah perubahan (Rp 3.749.228.158,00)

3. Pembiayaan Daerah

BPBD tidak melaksanakan pembiayaan daerah

**BAB IV**  
**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN**  
**PEMERINTAHAN DAERAH**

**A. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

Capaian kinerja urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan gambaran dari keberhasilan SKPD dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan bencana. Laporan capaian kinerja ini memuat data/informasi kinerja setiap urusan kebencanaan sesuai dengan indikator masing-masing urusan. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh BPBD sebagai berikut :

**A. 1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran**

A.1.1 Tabel Indikator Kinerja Kunci Keluaran

	IKK OUTCOME	NO	IKK OUTPUT	INDIKATOR	SUMBER DATA	KET
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	50%	BPBD	Masih berupa Dokumen dan belum disahkan
		2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	75 Orang 100%	BPBD	75 Orang yaitu Mengikuti sosialisasi Peringatan Dini Bencana
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100%	BPBD	Fc Perbup Terlampir
		2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100%	BPBD	Fc Perbup Terlampir
		3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	165 orang 100%	BPBD	106 orang yaitu Pelatihan water Rescue dan 34 orang pelatihan vertical rescue, dan 25 orang Pelatihan PUSDALOPS

	4	Persentase warga negara yang ikut Pelatihan	105 orang 100%	BPBD	105 Orang yaitu Pelatihan water Rescue
	5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%	BPBD	FC SK Posko Tanggap Darurat,
	6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Tidak ada	BPBD	

A. 2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	75 orang	BPBD	
		2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	105 orang	BPBD	
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	56160 Jiwa	BPBD	

**B. Akuntabilitas Kinerja**

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut.

**B.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator kinerja Utama akan dapat memberikan gambaran suatu ukuran keberhasilan Instansi Pemerintah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Penetapan Indikaor Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 – 2023, adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggung Jawab / Sumber data
1	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap masyarakat yang terdampak bencana	Hasil Survei	- Seksi pencegahan dan kesiapsiagaan  - Seksi Kedaruratan dan Logistik
		Indeks Risiko Bencana	(Skor)	- Seksi rehabilitasi dan Rekonstruksi

## **BAB V**

### **TUGAS PEMBANTUAN**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2021 tidak mendapatkan tugas pembantuan dari pusat yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia dan tidak memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah pusat, kabupaten lain dan Desa yang ada di Kabupaten Tanah Laut.

## BAB VI

### PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### 4.1 Urusan Ketenteraman, ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat

SPM bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi SPM Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah provinsi yaitu pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) Pelayanan informasi rawan bencana;
- 2) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- 3) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

#### 4.2 Target Pencapaian SPM oleh BPBD

Tabel 4.4.2 Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Keterangan
1	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	BPBD
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	BPBD
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	BPBD

#### 4.3. Realisasi

Tabel 4.13 Realisasi Pencapaian SPM di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Capaian
1	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	75 Orang (100%)	75 Orang (100%)

2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	105 Orang (100%)	105 Orang (100%)
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	56160 Jiwa (100%)	56160 Jiwa (100%)

#### 4.4 Alokasi Anggaran

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam tahun 2020 memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) setelah Perubahan Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp. 5.178.307742,00 yang terdiri dari:

Belanja Tidak Langsung : Rp. 2.327.832.388,00-

Belanja Langsung : Rp. 2.850.475.354,00-

Adapun untuk menunjang SPM terhadap dua indikator pelayanan dasar SPM dengan rincian anggaran sebagai berikut :

Tabel 4.2 Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Tahun 2021

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	<b>Program Penanggulangan bencana</b>	1.954.838.128,00-	1.227.146.511,00	62,77%
I	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	33.228.400,00-	30.847.900,00-	92,84%
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota	33.228.400,00-	30.847.900,00-	92,84%
II	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.001.345.122,00-	30.847.900,00-	83,51%
2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	918.820.036,00-	786.329.452,00-	85,58%
3	Penanganan Pascabencana Kabupaten / Kota	82.525.086,00-	49.904.655,00	60,47%
III	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana	920.264.606,00-	360.064.504,00	39,13%
4	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	824.913.706,00-	273.425.524,00	33,15%
5	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan	95.350.900,00-	86.638.980,00	90,86%

	Evakuasi korban Bencana Kabupaten / Kota			
--	--	--	--	--

#### 4.5 Dukungan Personil

Jumlah pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut keadaan Desember 2021 adalah sebagai berikut : Pegawai Negeri Sipil ( PNS) 15 (lima belas) orang dan Non Pegawai Negeri Sipil (PTT) 39 (tiga puluh sembilan) orang.

Tabel 4.51 Jumlah Pegawai Pergolongan / Pendidikan Tahun 2021

Golongan / Kepangkatan				Jumlah	Pendidikan							Jumlah
Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I		S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	
1	4	10	-	15	-	4 (Pejabat Struktural)	1	-	9	-	-	15

Tabel 4.52 Jumlah Personil BPBD

No	Uraian Jabatan	Jumlah
1	PNS BPBD	15 orang
2	PTT Tim Reaksi Cepat (TRC)	25 orang
3	PTT Pusdalops	6 Orang
4	PTT Petugas Administrasi	7 orang
5	PTT Petugas Kebersihan	1 Orang
	<b>J U M L A H</b>	<b>54 orang</b>

Tabel 4.53 Jumlah PTT / Pendidikan Tahun 2021 Pegawai Tidak Tetap (PTT)

No	Uraian Jabatan	Pendidikan				Jumlah
		S1	D3	SLTA	SLTP	
1	PTT Tim Reaksi Cepat (TRC)	1	1	21		25 orang
2	PTT Pusdalops	4	1	1		6 Orang
3	PTT Petugas Administrasi	4		3		7 orang
4	PTT Petugas Kebersihan			1		1 Orang
	<b>J U M L A H</b>					<b>39 orang</b>

#### 4. 6 Permasalahan dan Solusi

##### 1. Permasalahan

Permasalahan yang terjadi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan kegiatan Tahun Anggaran 2021, adalah :

- a) Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang belum tersedia secara lengkap dan belum sesuai standar nasional karena besarnya biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana tersebut.
- b) Pada saat musim kemarau Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan terjadi daerah yang sulit untuk dijangkau oleh armada BPBD sehingga terjadi kesulitan dalam pemadaman api.
- c) Bencana yang diluar prediksi sehingga Penyaluran logistik untuk kebutuhan dasar bagi korban yang terdampak bencana kadang kadang lebih atau kurang.
- d) Klasifikasi BPBD yang masih Type B mengakibatkan kesulitan untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi BPBD sebagai Komando, Koordinator dan Pelaksana lapangan pada saat tanggap darurat bencana karena stakeholder yang di komando dan di koordinasikan yaitu setingkat Eselon II.

## 2. Solusi

- a) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung tugas operasional lapangan seperti kendaraan damkar, rescue, dan peralatannya (baik untuk kebutuhan lapangan maupun untuk kelengkapan pengamanan personil).
- b) Untuk hutan dan lahan yang tidak bisa dilalui oleh armada maka dilakukan dengan water bombing itu pun harus menghubungi pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- c) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut selalu berkoordinasi dengan BMKG tentang prakiraan bencana di yang terjadi selama tahun 2021.
- d) Adanya dukungan lintas sektoral untuk kelancaran operasional lapangan

## **BAB VII PENUTUP**

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi, dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sebagaimana tercermin dari capaian kinerja kegiatan dan sasarannya, sedangkan hasil capaian kinerja keuangan berdasarkan indikator input berupa sumber dana adalah 72,40% di mana dari jumlah anggaran sebesar Rp **5.178.307.742,00,-** realisasinya sebesar Rp **3.749.228.158,00,-**. Dengan pencapaian kinerja 72,40% pada sasaran ini berarti kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Tanah Laut tergolong pada Kategori cukup, hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari kinerja aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut yang telah mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

Dari hasil analisa tersebut dapat dilihat capaian kinerja program/kegiatan serta permasalahan dan alternatif solusi. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2021 menjadi masukan bagi Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) untuk tahun selanjutnya.

Demikian laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut semoga sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi agar kendala yang dihadapi dapat dicari solusinya sedini mungkin, sehingga seluruh sasaran program tahun 2021 dapat dicapai dengan lebih baik dari tahun ketahun.

Pelaihari, Januari 2022

**Kepala Pelaksana**

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Tanah Laut**

  
**Ir. SAHRUDIN**  
**Pembina Tingkat I (IV/b)**  
**NIP. 19661210 199403 1 007**